

UPAYA *SELF EMPLOYED WOMEN'S ASSOCIATION* (SEWA) DALAM

ADVOKASI PEREMPUAN PEKERJA INFORMAL INDIA ERA

NARENDRA MODI TAHUN 2015-2021

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUSLIHAH FARADILA

18323197

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

**UPAYA *SELF EMPLOYED WOMEN'S ASSOCIATION* (SEWA) DALAM
ADVOKASI PEREMPUAN PEKERJA INFORMAL INDIA ERA
NARENDRA MODI TAHUN 2015-2021**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

MUSLIHAH FARADILA

18323197

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Upaya *Self Employed Women's Association* (SEWA) dalam Advokasi Perempuan Pekerja Informal India Era Narendra Modi Tahun 2015-2021

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

25 Mei 2022

الإسلام
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Hangga Fathana, S.IP.,B.Int.,St.,M.A

Dewan Penguji

- 1 Hasbi Aswar S.IP.,M.A.
- 2 Karina Utami Dewi S.IP.,M.A.
- 3 Hadza Min Fadhli Robby S.IP.,M.Sc.

Tanda Tangan

Karina
Min Fadhli Robby

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Rabu, 25 Mei 2022



Muslihah Faradila

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	13
1.7 Argumen Sementara	15
1.8 Metode Penelitian	16
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	16
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	17
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	17
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	18
1.9 Sistematika Pembahasan	18
BAB II	20
2.1. Perspektif Pemerintah India Terkait Gender	20
2.2. Pengaruh Tingkatan Edukasi Terhadap Ketimpangan Gender di India	21
2.3. Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Gender di India	23
2.4. Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Kekerasan Perempuan di India	25
2.5. Analisis Ketimpangan Gender Terhadap Pekerja Perempuan Sektor Informal India	27
2.6. Sejarah Munculnya Self Employed Women's Association (SEWA)	31
<i>2.6.1 Fungsi dan Kinerja SEWA Terhadap Pekerja Perempuan Sektor Informal India</i>	33
2.7. Keterkaitan SEWA dengan <i>Holistic Development</i>	34
<i>2.7.1 Dinamika Pekerja Perempuan Sektor Informal India Pasca <i>Holistic Development</i> Narendra Modi</i>	37

BAB III	40
3.1. Penerapan Asas <i>Contextualization</i>	41
Tabel 1. Penerapan Asas <i>Contextualization</i> SEWA 2015-2021	42
3.2. Penerapan Asas <i>Empowerment</i>	44
Tabel 2. Penerapan Asas <i>Empowerment</i> SEWA 2015-2021	45
3.3. Penerapan Asas <i>Collectivity</i>	47
Tabel 3. Penerapan Asas <i>Collectivity</i> SEWA 2015-2021	47
BAB IV	50
4.1. Kesimpulan	50
Tabel 4. Penerapan Tiga Asas Advokasi Stephen M. Rose	50
4.2 Rekomendasi	52
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR

Tabel 1. Penerapan Asas *Contextualization* SEWA 2015-2021

Tabel 2. Penerapan Asas *Empowerment* SEWA 2015-2021

Tabel 3. Penerapan Asas *Collectivity* SEWA 2015-2021

Tabel 4. Penerapan Tiga Asas Advokasi Stephen M. Rose

DAFTAR SINGKATAN

HBWWF	: Home-Based Women Workers Federation
HDI	: Human Development Index
HNSA	: Homenet South Asia
ILC	: International Labour Conference
ILO	: International Labour Organization
IWWAGE	: Initiative for What Works to Advance Women and Girls in the Economy
NCEUS	: National Commission for Enterprises in the Un-organised Sector
NCPCR	: National Commission for Protection of Child Rights
NCRB	: National Crime Records Bureau
NGO	: Non-Governmental Organization
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development
PLFS	: Periodic Labour Force Survey
RTE	: Right to Education
SEWA	: Self Employed Women Association
TLA	: Textile Labour Association
UNICEF	: United Nations International Children's Emergency Fund
WEIGO	: Women in Informal Employment; Globalizing and Organizing

Abstrak

Penelitian ini akan berfokus kepada peran SEWA sebagai NGO yang berbasis di India, terhadap proses SEWA dalam mengadvokasikan terkait isu kesejahteraan perempuan pekerja informal India, serta keterkaitannya terhadap keputusan kebijakan Narendra Modi. Penelitian dituliskan dengan menerapkan metode kualitatif, sementara teori yang menjadi dasar penelitian adalah teori Advokasi. Pasca hadirnya SEWA sebagai sebuah organisasi inklusif yang berfokus pada kesejahteraan perempuan pekerja informal India, terjadi berbagai dinamika dan membawa perubahan-perubahan baru dalam isu pekerja perempuan India. Namun, dinamika advokasi yang dilakukan SEWA dalam konteks kesejahteraan perempuan pekerja informal mengalami beberapa tantangan, terutama dari pemerintah India. Hal ini terjadi sebab pemerintah India beranggapan bahwasanya nilai-nilai yang dibawa SEWA selama proses advokasinya mengandung pemikiran alat Barat yang tidak sesuai dengan jati diri India.

Kata Kunci: Perempuan pekerja informal, Kesejahteraan, Advokasi, Pemerintah India, Pengambilan kebijakan.

Abstract

The study will focus on SEWA's role as an NGO based in India, to the process of SEWA in advocating the welfare of women informal workers in India, and its relevance to Narendra Modi policy decisions. This research is written by applying qualitative method, while the theory that is used as a basis of researching is Advocacy Theory. After the emergence of SEWA as an inclusive organization that focuses on the welfare of Indian women informal workers, there have been various dynamics in the condition and bring all the changes in issue of women informal workers in India. However, the dynamics of SEWA's advocacy in the context of welfare of women informal workers had faced several challenges, especially from the Indian government itself. This happened because the Indian government considered that the values that SEWA brought during its advocacy process contained western thought which is incompatible with India identity.

Keywords: *Women informal workers, Welfare, Advocacy, Government of India, Policy making*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendengar istilah perempuan di India, seringkali membawa konotasi negatif dalam masyarakat internasional. Ketimpangan gender yang masih erat, diskriminasi, kekerasan hingga pelecehan terhadap perempuan India merupakan fenomena yang masih seringkali terjadi. Pada tahun 2012, India dikategorikan sebagai negara keempat paling berbahaya bagi perempuan (BBC 2018). Kategori ini dilakukan berdasarkan analisis dari faktor angka kekerasan seksual dan non-seksual, terbatasnya akses dalam ekonomi, tingginya angka perdagangan manusia, berbagai praktek budaya yang berbahaya hingga faktor ancaman kesehatan. Pada tahun 2012, terdapat 242.270 kasus kekerasan terhadap perempuan di India (National Crime Records Bureau Ministry of Home Affairs. 2019). Kekerasan terhadap perempuan terus terjadi dan tidak tampak mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan pada tahun 2014, dimana kasus kekerasan terhadap perempuan berada di angka 337.992 kasus dan pada tahun 2015 memiliki 327.394 kasus (National Crime Records Bureau Ministry of Home Affairs. 2019). Pada tahun 2016, terdapat 322.949 kasus kekerasan yang dilaporkan ke pihak berwajib, sementara pada tahun 2017 ada 345.989 dan pada tahun 2018 terdapat 363.817 kasus kekerasan yang dilaporkan (National Crime Records Bureau Ministry of Home Affairs. 2019).

Kemudian, adanya stigma yang melekat dalam masyarakat India hingga tradisi dan praktik budaya yang menyatakan bahwa anak perempuan harus dinikahkan saat usia muda menyebabkan sepertiga dari gadis India menikah

sebelum usia 18 tahun (Marniati 2018). Hal ini menjadikan India sebagai negara dengan angka pengantin muda terbanyak di dunia (Marniati 2018). Pernyataan ini dibuktikan dengan adanya angka kelahiran sebesar 21 juta anak perempuan yang tidak diinginkan, unsafe abortion yang mengakibatkan kematian 8 perempuan perhari di India (Gutmacher Institute 2018). Bukti ini diperkuat dari UNICEF yang melaporkan bahwa seperempat jumlah kematian bayi secara global berasal dari India atau dengan angka sebesar 600.000 bayi setiap tahunnya (Singh 2015).

Sejak tahun 1980-an, pemerintah India telah mengisyaratkan kekhawatirannya terhadap berbagai permasalahan atau isu-isu terkait perempuan di India (Collier 1998). Pemerintah India menyadari bahwasanya faktor ekonomi, sosial, pendidikan hingga politik membawa pengaruh yang signifikan terhadap isu-isu perempuan di India. Sehingga pemerintah India kemudian melakukan berbagai upaya, seperti memberikan edukasi serta memberikan ruang bagi perempuan India untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan politik (Collier 1998). Meski pemerintah India telah berupaya memberikan ruang yang aman bagi para perempuan seperti membentuk UU perlindungan terhadap perempuan serta akses bagi perempuan untuk berkontribusi di dalam pemerintahan, upaya-upaya ini dinilai masih belum cukup. Pada realitanya, masih banyak sekali aspek-aspek di dalam badan masyarakat India yang harus ditinjau ulang guna mengupayakan terciptanya konstruksi sosial yang adil di masyarakat India. Terutama untuk menciptakan suatu kondisi dimana perempuan tidak lagi menjadi kelompok yang termarginalkan.

Tugas utama yang harus digencarkan oleh pemerintah India adalah dengan memperkuat community building sebagai ranah memperbaiki stigma yang ada di antara perempuan India, dimana perempuan India harus memahami bahwa

substansi atau values yang dimiliki oleh perempuan India jauh lebih besar dibanding stigma masyarakat yang cenderung destruktif terhadap kaum perempuan. Upaya ini penting untuk dilakukan, sebab pembangunan komunitas dapat menjadi wadah advokasi untuk membahas berbagai isu sosial, hal ini membantu para perempuan untuk lebih mengenal potensinya dan menjadi perempuan yang berdaya (Narayan 2002). Salah satu faktor krusial yang harus dipenuhi agar perempuan mampu menjadi manusia yang berdaya adalah perempuan harus mampu mandiri secara ekonomi (Srivastava 2020). Maka dari itu, perlu dilakukan advokasi yang tepat dalam membantu perempuan untuk dapat memiliki ruang untuk mandiri secara ekonomi, sehingga mampu bergantung pada diri sendiri alias mandiri, serta memiliki rasa kepercayaan untuk terus berkembang, agar mampu menghadapi berbagai kesulitan dan berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan (Narayan 2002).

Pentingnya memberdayakan perempuan kemudian mendorong sebagian masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan ruang-ruang yang aman bagi para perempuan India melalui berbagai pendekatan. Salah satu upaya pendekatan yang dilakukan masyarakat adalah dengan bergabung bersama SEWA (Self Employed Women's Association). SEWA sebagai salah satu NGO yang berdiri sejak tahun 1972 menyadari bahwa melalui kerjasama kooperatif antar para aktivis, antropologis, hingga masyarakat umum (volunter) dalam membahas isu-isu pemberdayaan, maka pemberdayaan itu membawa dampak yang besar tidak hanya bagi kehidupan perempuan melainkan juga terhadap norma, values, hingga hukum yang memayungi masyarakat India (Femida Handy 2003).

Sebagai NGO yang muncul dan berfokus menyelesaikan permasalahan perempuan India, sejatinya SEWA telah menjadi aktor yang menciptakan

community building, dimana SEWA turut melakukan pendekatan bersama aktor tidak hanya di level nasional, namun juga aktor internasional dalam rangka mewujudkan visi misi SEWA. Salah satunya adalah dengan menjalin kerjasama bersama International Trade Union Confederation (ITUC). SEWA yang mulanya terbentuk guna menghendaki adanya pembayaran upah yang adil bagi para pekerja perempuan yang tergabung dalam Women's Wing of the Textile Labour association, TLA, kemudian secara berkelanjutan terus menggerakkan upaya advokasi terkait pekerja perempuan. Hal ini sejalan dengan tujuan ITUC sebagai salah satu konfederasi yang membela hak dan kepentingan dari para pekerja melalui kerjasama internasional. Persamaan nilai dan tujuan inilah yang kemudian menjadikan SEWA melakukan pendekatan dan bekerjasama dengan ITUC.

Pendekatan yang dilakukan menjadikan SEWA sebagai salah satu instrumen penting dalam upaya pemberdayaan perempuan India, sebab aktivitasnya mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap advocacy ataupun peraturan diberbagai level pemerintahan. Hingga pada Mei 2007, pemerintah India membentuk national policy on voluntary sector (India Planning Commission 2008). Peraturan ini dibentuk sebagai langkah awal dalam proses menjalin hubungan kerjasama antara pemerintah dengan organisasi volunteer atau NGO. Melalui peraturan ini, pemerintah India berkomitmen untuk mendorong, membentuk, serta memberdayakan sektor NGO hingga volunteer dalam beragam bentuk dan fungsi, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan aspek sosial, budaya, hingga ekonomi masyarakat India (Mercer 2002).

Tidak berhenti disitu, pemerintah India di masa kepemimpinan Narendra Modi kemudian membentuk arah pembangunan dengan konsep holistic, tepatnya

yakni pembangunan ataupun perkembangan di masyarakat dari aspek intelektual, mental, fisik, hingga kemampuan sosial guna menghadapi berbagai tantangan. (Sharma 2017). Melalui konsep *holistic development*, Modi menyatakan bahwa konsep ini tidak dapat tercapai maupun berjalan secara maksimal apabila tidak disertai dengan adanya penyelesaian terkait isu ketimpangan gender di India (India News 2020). Maka dari itu, Modi kembali mengatakan bahwa pemerintah India berkomitmen dalam melakukan pembangunan *holistic* dengan menjamin untuk mengatasi ketimpangan gender melalui regulasi atau aturan yang berlaku di India (The New Indian Express 2020).

Maka dari itu, berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh SEWA dalam upayanya melakukan advokasi terkait isu kesejahteraan pekerja perempuan informal India, serta bagaimana berbagai kebijakan yang dibentuk selama pemerintahan Narendra Modi mempengaruhi upaya SEWA dalam melakukan perluasan kebebasan (*Expansion of freedom*) terhadap perempuan di India.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh SEWA dalam advokasi perempuan pekerja informal India era Narendra Modi tahun 2015-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi kondisi perempuan pekerja informal di India serta kebijakan terkait perempuan pekerja informal di India.

2. Untuk mengetahui proses advokasi SEWA dalam isu perempuan pekerja informal India.
3. Untuk menganalisa bagaimana korelasi antara kebijakan Narendra Modi selama memerintah dengan isu kesejahteraan perempuan pekerja informal di India.

1.4 Cakupan penelitian

Penulis mengambil rentang waktu analisis selama masa pemerintahan Modi yakni mulai tahun 2015 dibatasi hingga tahun 2021, sebab melihat bahwa selama Modi menjabat sebagai Perdana Menteri, India masih memiliki angka kekerasan yang tinggi. Hal ini dibuktikan bahwa pada tahun 2018, India menempati peringkat pertama sebagai negara dengan kategori paling berbahaya bagi perempuan tepat di atas Afghanistan, Suriah dan Arab Saudi (BBC News 2019). Sementara pada tahun 2012, India justru berada di peringkat keempat sebagai negara dengan kategori paling berbahaya bagi perempuan (BBC 2018). Peringkat satu yang didapatkan India pada tahun 2018 ini menunjukkan bahwa keadaan perempuan di India semakin terancam dan tidak mengalami perubahan menuju arah yang lebih baik, sementara pada tahun tersebut, India telah berada di bawah kepemimpinan Narendra Modi.

Di tahun yang sama yakni pada tahun 2018, data turut menunjukkan bahwa terdapat satu perempuan yang diperkosa di India dalam rentang waktu 15 menit, dimana terdapat 363.817 kasus yang dilaporkan kepada pihak berwajib (National Crime Records Bureau Ministry of Home Affairs. 2019). Oleh sebab itu

pengambilan rentang waktu ini dilakukan untuk memastikan apakah naiknya angka kekerasan yang dialami perempuan di India turut dipengaruhi oleh kebijakan yang dirancang oleh pemerintah. Serta untuk menganalisa apakah kebijakan yang diterapkan pemerintah di masa kepemimpinan Modi membantu pergerakan SEWA atau justru membatasi ruang gerak SEWA dalam upaya pemberdayaan terhadap perempuan di India.

1.5 Tinjauan Pustaka

Posisi India sebagai salah satu negara dengan angka diskriminasi yang tinggi terhadap perempuan menarik minat penulis untuk menganalisis faktor apa saja yang menjadi pemicu tingginya angka diskriminasi terhadap perempuan India. Pengaruh NGO merupakan salah satu elemen utama yang hendak di elaborasi dalam penelitian ini. Sehingga, penulis mengambil beberapa tulisan dan menganalisis secara lebih mendalam terkait pengaruh NGO dalam upaya pemberdayaan perempuan di India sebagai materi pendukung dan pembanding yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Jurnal artikel karya Stacey Burlet yang berjudul *Gender relations, 'Hindu' nationalism, and NGO responses in India* memberikan pandangan yang cukup mendetail terhadap peranan NGO dalam upaya pemberdayaan perempuan di India. Burlet (1999) menyampaikan di dalam penulisannya bahwa aktivitas NGO di India yang bergerak di level regional hingga nasional, memiliki potensi untuk mendapatkan atensi ataupun perhatian dari aktor-aktor nasionalis India (Burlet 1999). Burlet (1999) memperkirakan bahwa besarnya atensi yang diterima oleh

NGO ini kemudian menjadikan sebagian dari NGO cenderung melakukan aktivitas pemberdayaan terhadap perempuan dengan hati-hati meski masih berada di level lokal atau regional, hal ini dilakukan demi menjaga pergerakan NGO agar terhindar dari intervensi para pemangku kepentingan yang seringkali tidak sesuai dengan visi misi sebenarnya (Burlet 1999). Burlet juga menyatakan bahwa aktivitas NGO sebagai salah satu faktor penunjang pemberdayaan perempuan di India, dipersulit dengan adanya pandangan dari sebagian pemangku kepentingan bahwa isu penindasan terhadap perempuan merupakan secondary issue serta aktivitas NGO ini dipandang tidak merepresentasikan harapan sejati dari masyarakat India. Namun Burlet menyatakan bahwa NGO di India tetap melakukannya, salah satunya dengan memberdayakan perempuan secara ekonomi sebab NGO memiliki pandangan bahwa kemerdekaan ekonomi mampu menjadi jawaban terhadap berbagai ketimpangan yang terjadi di India (Burlet 1999). Argumen yang diberikan oleh Stacey Burlet dalam tulisannya sudah cukup menarik. Namun, penulis melihat bahwa terdapat kekurangan dari jurnal ini dimana Burlet hanya menjelaskan faktor yang mempersulit pergerakan NGO dalam upayanya melakukan pemberdayaan masyarakat India, khususnya pemberdayaan terhadap perempuan. Sehingga melalui penelitian ini, penulis akan menambahkan faktor yang mempermudah pergerakan SEWA dalam upayanya melakukan pemberdayaan perempuan di India dengantetap menganalisis faktor yang menghambat SEWA dalam proses pemberdayaan.

Tulisan Burlet terkait kemerdekaan ekonomi terhadap perempuan sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Dhruba Hazarika melalui jurnal artikelnya *Women Empowerment in India: A Brief Discussion*. Hazarika (2011) menyatakan bahwa untuk dapat melakukan pemberdayaan terhadap perempuan, perempuan harus

memiliki ruang gerak untuk dapat mandiri secara finansial. Hazarika berkata bahwa ketika seorang perempuan sudah mampu berdaya secara materi, maka perempuan akan memiliki kepercayaan diri dan berani melawan stigma di masyarakat yang cenderung memarginalkan pihak perempuan. Melalui tulisannya, Hazarika menyatakan bahwa pemerintah India telah melakukan ratifikasi terhadap berbagai perjanjian internasional maupun merancang konstitusi yang menjamin kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan sebagai langkah komitmen pemberdayaan di India, termasuk salah satu diantaranya dengan memberi ruang bagi NGO agar dapat berpartisipasi dalam ruang lingkup yang lebih luas ke dalam bidang pemberdayaan perempuan di India (Hazarika 2011). Namun segala upaya yang dilakukan pemerintah tersebut tidak akan berjalan secara maksimal apabila perempuan tidak memiliki kesungguhan untuk memberdayakan diri sendiri (Hazarika 2011). Penulis melihat bahwa Hazarika telah cukup baik menjelaskan faktor yang mampu mempengaruhi upaya pemberdayaan perempuan di India, mulaidari faktor mandiri secara finansial hingga penerapan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam komitmennya melakukan pemberdayaan di India. Namun, Hazarika hanya menjelaskan faktor internal terkait upaya pemberdayaan perempuan di India tanpa menjelaskan faktor eksternal yang sejatinya turut memberikan dampak terhadap proses pemberdayaan perempuan disana. Maka dari itu, penelitian ini akan mengidentifikasi secara lebih detail terkait faktor internal maupun eksternal yang memberikan sumbangsuhnya terhadap proses pemberdayaan perempuan di India.

Anna S. Walker menyatakan di dalam jurnalnya *The Women's Movement and Its Role in Development* bahwa, peran perempuan dalam sektor informal

seringkali tidak mendapatkan rekognisi sehingga rentan mengalami ketimpangan dan menjadi kelompok yang terpinggirkan, seperti yang terjadi di Ahmedabad, India (Walker 2000). Menurut penulis, Inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor penghambat perempuan di India untuk berkembang menuju pemberdayaan. Di dalam karyanya, Walker kemudian menyatakan bahwa sejak dahulu NGO mampu menjadi alat bagi para perempuan untuk dapat melakukan kontribusi secara nyata dan bergerak aktif di dalam konteks sosial, politik hingga ekonomi. Walker juga memasukkan pandangan dari para antropologi feminis bahwa berbagai NGO yang bergerak terhadap bidang pemberdayaan perempuan di level regional, nasional hingga internasional telah secara nyata memberikan sumbangsih aktif dalam membawa perubahan besar terhadap kondisi perempuan yang mulanya termarginalkan (Walker 2000). Walker (2000) dalam tulisannya telah berhasil mengidentifikasi peranan yang dimiliki oleh perempuan dalam konteks pemberdayaan. Keterlibatan perempuan dinyatakan oleh Walker mampu membawa perubahan dalam konteks sosial, politik hingga ekonomi. Namun penelitian Walker memiliki kekurangan dimana Walker belum menjelaskan secara mendetail terkait contoh perubahan apa saja yang dihasilkan dari adanya keterlibatan perempuan dalam bidang sosial, politik hingga ekonomi serta bagaimana langkah-langkah NGO dalam melakukan pemberdayaan tersebut. Sehingga melalui penelitian ini, penulis mencoba menganalisa langkah-langkah yang dilakukan oleh SEWA dalam upaya memberdayakan perempuan di India serta melihat berbagai perubahan yang dihasilkan dari keterlibatan perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi

Selanjutnya, dalam jurnal artikel yang ditulis oleh Erica Bornstein dan Aradhana Sharma yang berjudul *The righteous and the rightful: The technomoral*

politics of NGOs, social movements, and the state in India memaparkan secara mendalam bahwa sebagian pihak yang memiliki otoritas di India cenderung menekan dan berupaya membatasi aktivitas NGO sebab dipandang memicu turunnya reputasi India di arena Internasional (Erica Bornstein 2016). Bornstein (2016) dan Sharma (2016) menyatakan dalam tulisannya bahwa pemerintah India cenderung menggunakan kekuasaan dan power yang mereka miliki untuk menjustifikasi beberapa NGO di India sebagai pergerakan organisasi yang bersikap anti-nasional. Bornstein (2016) dan Sharma (2016) menambahkan bahwa pemerintah India menunjukkan sikap yang tidak konsisten terhadap pergerakan NGO dimana di dalam suatu kondisi tertentu, pemerintah menyambut NGO dengan tangan terbuka dan memandang mereka sebagai collaborator atau pihak yang dapat diajak bekerjasama. Namun di kondisi lain, pemerintah juga seringkali membatasi pergerakan NGO dalam upaya-upayanya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat India sebab dipandang merusak reputasi dari pemerintahan India. Dalam tulisannya, Bornstein dan Sharma turut melampirkan contoh dimana salah satu otoritas pemerintahan dalam hal ini *The Indian Intelligence Bureau* melakukan upaya pengekan terhadap aktivitas NGO di India, yakni dengan memberikan laporan kepada Perdana Menteri Modi sebagai upaya peringatan terhadap pergerakan NGO yang dipandang merusak reputasi India (Erica Bornstein 2016). Argumen yang dibangun oleh Bornstein dan Sharma sudah baik dalam memaparkan bagaimana hubungan yang terjalin antara pemerintah dengan NGO yang ada di India. Tulisan ini juga sudah mampu melampirkan contoh respons yang dilakukan oleh pemerintah India terhadap aktivitas NGO di negaranya. Namun, penelitian tersebut kurang membahas terkait dengan sudut pandang dari

NGO. Sehingga, penelitian ini akan menganalisis secara lebih dalam terkait dengan tindakan SEWA dalam merespons pemerintah yang membatasi pergerakan NGO di India.

Jurnal karya Sabilina Mareta yang berjudul Peran UN Women dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011-2015 memberikan pandangan yang hampir serupa dengan jurnal karya Bonstein dan Sharma. Melalui jurnal artikelnya, Mareta (2017) menyatakan bahwa pemerintah tidak berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan di India (Mareta 2017). Meski pada realitanya pada tahun 1993, pemerintah India telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) (Mareta 2017). Hal ini dikatakan oleh Mareta sebagai sebuah bukti bahwasanya pemerintah India belum mampu mengimplementasikan maupun menegakkan kebijakan hukum terkait upaya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan (Mareta 2017). Dalam penulisan ini, argumen yang dibangun Mareta sudah baik. Namun, Mareta tidak menyampaikan bahwa lemahnya praktik hukum hingga ketidaktegasan pemerintah India memberikan pengaruh langsung terhadap aktivitas NGO disana. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas terkait dampak dari ketidaktegasan pemerintah dan kaitannya terhadap proses advokasi yang dilakukan SEWA dalam upaya melakukan pemberdayaan perempuan di India.

Berdasarkan penjelasan diatas, kelima jurnal artikel menjelaskan bahwa terdapat perbedaan dalam menganalisis terkait upaya pemberdayaan perempuan di India. Terdapat jurnal yang memandang bahwa aktivitas pemberdayaan perempuan di India dipermudah dengan hadirnya NGO maupun pemerintah. Disisi lain,

terdapat pula jurnal yang menganalisis pemberdayaan perempuan di India dengan meninjau dari faktor-faktor tertentu. Namun, berbagai jurnal diatas masih memiliki beberapa kekurangan seperti tidak adanya rentang waktu yang jelas dalam melakukan analisis serta tidak terdapat jurnal yang menggunakan teori advokasi. Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus untuk melakukan analisis terhadap faktor- faktor yang mempengaruhi SEWA dalam upaya pergerakannya memberdayakan perempuan di India selama rentang waktu pemerintahan Narendra Modi dengan menggunakan perspektif advokasi.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis dan menjawab pertanyaan terkait penelitian, penulis menggunakan pendekatan Advokasi sebagai kerangka kerja dalam melakukan peninjauan terkait isu yang dibawakan dalam tulisan ini. Berdasarkan konsep teori advokasi yang dikembangkan oleh Stephen M Rose pada jurnalnya *Advocacy/Empowerment: An Approach to Clinical Practice for Social Work*, penerapan konsep advokasi ini dilakukan sebagai langkah menjamin terpenuhinya hak-hak kelas sosial tertentu dalam memperoleh kesempatan yang seharusnya mereka dapatkan (Rose, 1990). Tidak hanya itu, advokasi juga diperlukan sebagai sarana untuk mempengaruhi serta melakukan perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal/nasional dengan mengimplementasikan beberapa asas advokasi sesuai pengembangan teori advokasi (Rose, 1990). Rose turut menyatakan bahwa proses advokasi ini melibatkan proses-proses politik, dimana proses ini digunakan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan dari para pemangku

kebijakan (Rose, 1990). Pendekatan advokasi ini seringkali digunakan untuk membahas isu-isu tertentu yang berkaitan dengan kemiskinan, ketidaksetaraan, serta isu keamanan kelompok sosial tertentu (Dorsey 2008). Sehingga, berdasarkan definisi tersebut, pendekatan advokasi dari Rose ini diterapkan sebagai landasan konseptual dalam menganalisa secara spesifik peranan SEWA sebagai NGO, dalam upaya memperjuangkan emansipasi serta melakukan pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok yang termarjinalkan.

Konsep advokasi dapat digunakan tidak hanya ketika NGO mencoba memberikan pemahaman kepada masyarakat umum terkait isu yang dibawakan. Namun, konsep ini dapat diterapkan pula ketika hubungan antara kelompok domestik dan pemerintah mengalami hubungan yang tidak efektif, terutama dalam proses penyelesaian terhadap suatu konflik ataupun isu tertentu yang sejalan dengan pergerakan NGO tersebut. Para aktor yang menerapkan pendekatan advokasi ini dapat menjalankan pergerakannya dengan memperluas jejaring komunikasinya, baik bersama aktor lain yang bergerak di level lokal maupun nasional, hingga turut menjalin interaksi berkelanjutan dengan aktor lain dengan melintasi batas negara (transnasional) atau aktor di level internasional (Rose, 1990).

Berdasarkan pengembangan teori advokasi oleh Rose, terdapat beberapa asas yang perlu diterapkan selama proses advokasi dilaksanakan. Pertama adalah *contextualization*, dimana asas ini di-implementasikan pada advokasi tahap pertama, yakni dengan melakukan penyamaan persepsi terkait konteks isu yang dibawakan antara target audiens vs aktor yang sedang menjalankan advokasi (Rose, 1990). Tahapan ini dilakukan sembari memperhatikan situasi serta kondisi di lapangan, sehingga tujuan dari advokasi dapat tersampaikan dengan baik kepada

sasaran audiensi. Sementara itu, asas kedua yang digunakan dalam proses advokasi selanjutnya adalah *Empowerment*, dimana asas ini digunakan untuk mempersiapkan strategi seperti apa saja yang telah dan dapat dijalankan untuk memperluas proses advokasi, membangun kepercayaan, sehingga kepercayaan yang didapatkan dapat mengembangkan jejaring kerjasama serta meningkatkan power dari audiens beserta aktor yang menjalankan (Rose, 1990).

Kemudian, asas ketiga yang diterapkan dalam proses advokasi ini adalah *Collectivity*, dimana ketika tujuan advokasi telah tersampaikan dan kerjasama telah terjalin dalam ruang lingkup yang lebih luas, maka rencana kerja dapat dikembangkan dengan berbagai aksi yang dapat membantu perwujudan visi misi. Sehingga jika diaplikasikan ke dalam penelitian ini, penulis akan membahas ketiga tahapan yang dilakukan SEWA selama proses advokasinya dalam isu pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan pekerja informal India, baik tahapan advokasi yang dilakukan di level domestik maupun internasional. Tidak hanya itu, pendekatan advokasi ini juga akan menjadi acuan dalam menganalisis sumbangsih SEWA terhadap pembentukan ide-ide baru, peranannya sebagai penyedia informasi, serta menganalisa output yang dihasilkan dari proses advokasi yang dilakukan.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan observasi yang dilakukan melalui berbagai sumber dan data yang sesuai dengan topik penelitian, serta melalui basis teori advokasi, penulis mendapati bahwa tiga asas yang digunakan dalam tahapan dalam proses advokasi. Diimplementasikan oleh SEWA secara baik dan mampu memberikan peranan yang

nyata terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Narendra Modi terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan pekerja informal di India.

1.8 Metode Penelitian

Adapun langkah yang penulis terapkan dalam menjawab rumusan masalah terkait penelitian adalah dengan melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber data guna menemukan informasi penunjang. Informasi penunjang ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Penulis menggunakan jurnal-jurnal, laporan hingga artikel yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga penelitian dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan guna mengumpulkan data sekunder. Disamping itu, dalam proses pengambilan data primer, penulis menggunakan artikel hingga berbagai laporan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah maupun instansi yang terkait dengan NGO dan pemberdayaan perempuan di India.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penulis memahami bahwa dalam melakukan penelitian ini, tinjauan literatur serta data-data penunjang merupakan aspek penting guna memberikan pemahaman secara lebih mendalam serta melakukan analisis terkait proses penelitian. Proses peninjauan literatur yang relevan dengan penelitian juga menjadi aspek yang membantu penulis dalam melakukan eksplorasi terkait isu yang sedang dianalisis. Sehingga penulis menggunakan metode kualitatif dalam upaya memberikan ruang lebih luas untuk memahami secara mendalam pengaruh NGO terhadap isu perempuan pekerja informal India periode tahun 2015-2021.

Melalui bukunya, J.R. Raco menyatakan bahwa untuk dapat mencari jawaban atau pemahaman mendetail terkait suatu isu hingga peristiwa tertentu,

perlu dilakukan dengan menerapkan penelitian berbentuk metode kualitatif (Dr. J.R Raco 2010). Penggunaan metode kualitatif mengizinkan penulis untuk mendapatkan hasil analisis yang mendalam terkait isu yang sedang dibahas, sehingga melalui pendekatan ini, penulis berharap mampu menemukan jawaban atas pertanyaan di dalam penelitian ini.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah salah satu NGO India yakni SEWA. SEWA memfokuskan pergerakannya dalam upaya kesejahteraan perempuan pekerja informal India. Penulis juga akan melakukan analisa kepada aktor lainnya yakni pemerintah India, masyarakat lokal, internasional hingga instansi yang memiliki keterkaitan dengan upaya NGO dalam memberikan pengaruhnya terhadap perempuan pekerja informal India. Adapun objek yang akan diteliti melalui penelitian ini adalah perempuan pekerja informal sebagai kelompok yang termarginalkan di India.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan sumber primer dan sekunder. Penulis juga menerapkan proses seleksi serta identifikasi terhadap sumber data yang dinilai sesuai dengan pertanyaan terkait penelitian. Dalam upaya mengumpulkan sumber primer, penulis menggunakan artikel serta laporan yang dikeluarkan oleh SEWA, pihak pemerintah maupun instansi lainnya yang terkait dengan pemberdayaan perempuan India. Sementara sumber sekunder diperoleh dari

berbagai jurnal, laporan hingga artikel kredibel yang dikeluarkan oleh lembaga- lembaga penelitian.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam menjawab pertanyaan terkait penelitian, penulis menerapkan metode penelitian yang bersifat analisis dan deskriptif. Proses penelitian dilakukan dengan upaya pengumpulan data primer dan sekunder, dimana penulis menggunakan sumber data untuk menganalisis isu yang terjadi sebelum diakhiri pada sebuah kesimpulan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Berdasarkan urutan pembahasan, penelitian ini terbagi ke dalam empat bab utama:

- Bab pertama akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan dan cakupan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, argumen sementara, sistematika penelitian hingga sistematika pembahasan.
- Bab kedua akan menjelaskan terkait ketimpangan gender di India, dianalisa dengan melihat perspektif dari pemerintah India terhadap gender, serta membahas tentang relasi antara pemberdayaan ekonomi, tingkatan edukasi terhadap isu perempuan pekerja informal India.
- Bab ketiga akan memaparkan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan advokasi SEWA terhadap kesetaraan perempuan pekerja informal India ditinjau dari perspektif advokasi.

- Bab ke-empat akan dituliskan mengenai kesimpulan dan Saran.

Dalam hal ini, kesimpulan berfungsi untuk merangkum seluruh argumentasi, data dan isu yang dianalisa dalam penelitian. Sementara saran berguna dalam merekomendasikan penelitian lanjutan di masa yang akan datang

BAB II

KEBIJAKAN TERKAIT GENDER DI INDIA

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai definisi beserta kebijakan terkait gender di India. Selain itu, turut dipaparkan pula analisis ketimpangan gender di India terutama terhadap pekerja perempuan sektor informal, yakni dengan memfokuskan penelitian kepada kebijakan pemerintah terkait gender, serta kaitannya dengan pergerakan salah satu NGO yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan India.

2.1. Perspektif Pemerintah India Terkait Gender

Pemerintah India, tepatnya sebelum memasuki tahun 2020, seringkali memiliki pandangan yang timpang terhadap figur gender di India. Jika dikutip dari sejarah yakni sejak awal abad ke 20, baik secara sosial hingga ekonomi, India adalah sebuah negara yang di dominasi oleh laki-laki dan dilingkupi oleh sistem patriarki (Bannerji 2016). Dimana norma-norma sosial di India dibentuk dengan berlandaskan pada sistem kasta, ras, agama hingga gender yang semakin memberikan pengaruh dalam menjadikan perempuan sebagai figur yang dikesampingkan, seperti halnya dikesampingkan dari faktor pendidikan, kesehatan, hingga faktor ekonomi (Gorringe 2018).

Kuatnya sistem patriarki di India, mempermudah laki-laki India dalam mendapatkan akses peluang kerja, kemudahan dalam akses pendidikan hingga akses kesehatan (B. R. Sharma 2004). Ketidakseimbangan dalam pemberian kesempatan antara laki-laki vs perempuan India menjadikan perempuan India sulit

untuk berkontribusi secara penuh dan nyata untuk turut andil dalam pertumbuhan India. Adanya ketidaksetaraan dalam pemberian kesempatan pada perempuan India menjadi salah satu unsur yang membuktikan bahwa ketimpangan gender masih melekat erat dalam kondisi sosial masyarakat India. Hal ini dibuktikan melalui data yang menyatakan bahwa India berada di peringkat 131 dari 188 negara dalam Indeks Ketimpangan Gender Program Pembangunan PBB (Doshi 2018).

2.2. Pengaruh Tingkatan Edukasi Terhadap Ketimpangan Gender di India

Sejatinya, akses edukasi yang terbuka lebar bagi perempuan di segala tingkatan pendidikan, akan memberikan sumbangsih yang nyata terhadap pemberdayaan perempuan secara ekonomi (Daga 2021). Terbukanya akses edukasi bagi perempuan juga dinilai mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh peningkatan akses edukasi terhadap pertumbuhan ekonomi ini dibuktikan di negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) seperti Finlandia, Jerman dan Perancis, dimana terdapat peningkatan hingga 50% di bidang ekonomi selama lebih dari 50 tahun terakhir (UN Women 2018).

Diberikannya akses edukasi terhadap perempuan, menjadikan perempuan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan, terutama kemampuan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (sandang, pangan, papan) (The Hindu 2021). Kemampuan yang dimiliki perempuan dapat memperluas kesempatannya dalam mengakses lapangan pekerjaan. Sehingga dalam hal ini, perempuan mampu mandiri secara finansial, memiliki jaminan penuh dan merdeka atas diri sendiri.

Namun, terdapat salah satu bentuk diskriminasi sosial dimana perempuan India memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan secara penuh. Meski sejak tahun 2009, pemerintah India telah mengesahkan Landmark Right to Education Act (RTE) dengan menggratiskan biaya pendidikan anak di usia 6-14 tahun, pasca melewati umur 6-14 tahun, anak-anak berjenis kelamin perempuan sulit untuk dapat melanjutkan pendidikan (Kaushal 2012). Hal ini dapat terjadi, sebab adanya stigma sosial di India yang memandang bahwa perempuan yang telah berumur 14 tahun ke-atas tidak berhak mendapatkan pendidikan penuh dibandingkan dengan laki-laki (Kaushal 2012). Stigma ini merupakan salah satu bentuk nyata dari diskriminasi berbasis gender di India. Tidak hanya itu, keterbatasan ekonomi seringkali menjadi salah satu alasan yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan, dimana perempuan dituntut untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Tuntutan tersebut dapat berupa arahan untuk bekerja, hingga arahan untuk menikah.

Berbagai landasan yang tertulis di dalam RTE tidak cukup kuat untuk memberikan jaminan perlindungan edukasi kepada anak-anak perempuan di India. Sebab, RTE tidak menuliskan pelarangan terhadap anak-anak untuk melakukan pekerjaan rumah tangga ataupun pekerjaan di bidang agrikultur (R Maithreyi 2018). Sehingga akibat adanya tuntutan sosial ekonomi, pada tahun 2018, National Commission for Protection of Child Rights mengeluarkan pernyataan dimana 40% dari perempuan India dengan kisaran usia 15-18 tahun telah keluar dari sekolah serta sekitar 65% dari perempuan usia 15-18 tahun telah terlibat dalam pekerjaan rumah tangga (Scroll In 2018).

Berdasarkan data, perempuan India melakukan pekerjaan tidak berbayar atau unpaid care work sejumlah 10 kali lebih banyak dibandingkan laki-laki India (Kamdar 2020). Dimana angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan India bekerja 3 kali lebih banyak daripada rata-rata waktu kerja secara global (Kamdar 2020). Sejumlah hampir 84% dari pekerjaan tidak berbayar tersebut dilakukan oleh perempuan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, diantaranya termasuk anak perempuan yang tidak mampu melanjutkan pendidikan, sementara Ibu melakukan pekerjaan di sektor informal di luar rumah (Kamdar 2020). Selain itu, pekerja laki-laki India menghabiskan waktu kerjanya untuk pekerjaan berbayar sebesar 80% (Kamdar 2020).

2.3. Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Gender di India

Sejatinya, perempuan memiliki peran yang signifikan untuk menjadi penggerak roda sosial ekonomi politik suatu negara. Sebagaimana yang disampaikan oleh UN Women, ketika semakin banyak perempuan yang bekerja di suatu negara, maka pertumbuhan ekonomi akan melonjak dengan signifikan (UN Women 2018). Hal ini dapat terjadi, sebab keterlibatan perempuan akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas, meningkatkan diversifikasi ekonomi serta perubahan positif lainnya seperti mewujudkan pendapatan yang setara. India dalam hal ini, belum terlihat maksimal dalam mengimplementasikan peran perempuan India dalam berbagai sektor.

Pemberdayaan perempuan, salah satunya pemberdayaan di bidang ekonomi, merupakan hal yang sangat penting dan memiliki urgensi nyata untuk dilakukan. Sebab, melalui pemberdayaan secara ekonomi, perempuan mampu mandiri secara

finansial (Tracey L. Moyle 2006). Kesempatan untuk mandiri secara finansial ini akan mengarahkan perempuan untuk dapat mewujudkan hak-hak serta kesetaraan gender secara maksimal. Terdapat berbagai upaya yang dapat diimplementasikan guna mewujudkan pemberdayaan perempuan secara penuh, diantaranya yakni Pertama, membuka peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi di pasar yang ada. Kedua, memberikan akses dan kontrol kepada perempuan terhadap sumber daya produktif, akses dan kontrol terhadap waktu, serta akses dan kontrol terhadap kehidupan serta tubuh mereka sendiri. Ketiga, mengakui serta tidak menghalangi hak perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, baik dari tingkatan rumah tangga hingga tingkatan internasional (Paola Pereznieto 2014).

Berdasarkan data yang dilampirkan oleh International Labor Organization (ILO), sekitar 81,8% pekerja perempuan India bergerak di sektor informal (International Labour Office 2018). Meski berada di kisaran angka yang tinggi, pemerintah India memiliki pandangan bahwa perempuan yang bekerja di sektor informal tidak dapat dikatakan sebagai pekerja nyata, sebab tidak memiliki hubungan *employe-employed* (Boeri 2018). Sebagaimana definisi yang disampaikan *National Commission for Enterprises in the Un-organised Sector* (NCEUS) India, bahwa pekerja informal merupakan pekerja sektor rumah tangga yang tidak terorganisir, tidak termasuk pekerja tetap yang mendapatkan manfaat jaminan sosial. Tingginya angka pekerja informal perempuan di India disebabkan oleh beberapa faktor, namun salah satu faktor utamanya adalah ketimpangan gender (Ministry of Labour&Employment India 2013). Sehingga penting untuk

memperhatikan pekerja informal perempuan India, terutama kesetaraan akses terhadap hak pendapatan dan bantuan kesejahteraan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh UN Women, melalui pemberdayaan ekonomi, perempuan dapat mewujudkan kesetaraan gender dengan maksimal (UN Women 2018). Namun, ketidak-aktifan pemerintah India dalam mengencarkan pemberdayaan perempuan secara ekonomi, menjadi salah satu faktor yang menghambat perwujudan hak-hak perempuan di India. Dalam hal ini, terdapat banyak kasus yang secara tidak langsung memberikan gambaran kepadamasyarakat luas hingga masyarakat internasional bahwa isu ketimpangan gender di India telah menjadi isu yang mengakar, serta tidak kunjung menemui perubahan menuju arah lebih baik. Berbagai kasus tersebut tidak hanya berfokus pada tindakandiskriminasi gender dalam hal ekonomi, namun juga berkisar perihal diskriminasi dalam mendapatkan keadilan sosial hingga *gender-based violence* yang kemudian memicu kekerasan fisik, psikologis hingga seksual (Saha 2013).

2.4. Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Kekerasan Perempuan di India

Tidak hanya dihentikan akses dalam menempuh pendidikan lebih lanjut, menikahkan anak perempuan di usia muda telah menjadi sebuah keputusan yang lumrah terjadi di India (Lal 2013). Tindakan ini dilakukan oleh sebagian orangtua, sebab orangtua memandang bahwa menikahkan anak perempuan adalah cara mudah untuk meringankan atau mengurangi pengeluaran rumah tangga. Namun, tindakan ini memiliki banyak sekali risiko, seperti diantaranya memberikan peluang terjadinya peningkatan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap

perempuan (H.Forbes 1979). Hal ini dapat terjadi, sebab terdapat stigma hingga berbagai tradisi di India yang sarat akan diskriminasi gender, seperti salah satunya tradisi yang bernama Kanyadaan (Ladage 2017). Tradisi ini memiliki pandangan bahwa perempuan yang telah menikah adalah “properti” milik suami, dimana perempuan tersebut akan kehilangan hak atas diri sendiri serta dilarang memiliki hubungan dengan keluarganya pasca perempuan itu menikah (Ladage 2017). Pandangan ini semakin mempersempit pergerakan perempuan untuk dapat berdaya atas dirinya sendiri, serta menjadikan perempuan semakin riskan dalam mengalami kekerasan.

Tindak kekerasan yang diterima oleh perempuan atas basis gender adalah bukti nyata adanya pelanggaran dalam hak asasi manusia, dimana pelanggaran ini adalah satu hal yang telah mengakar akibat adanya ketidaksetaraan gender, abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan serta adanya norma-norma yang merugikan para perempuan. Pada tahun 2020 saja, angka kejahatan terhadap perempuan India yang terbagi ke dalam 6 (enam) kategori yakni pemerkosaan, penganiayaan, “dowry deaths” atau pembunuhan yang dilakukan suami dalam rumah tangga, kekerasan, penyerangan cairan kimia (asam) (acid attack) hingga penculikan masih berada di kisaran angka yang cukup tinggi (Kapila 2020).

Biro Catatan Kejahatan Nasional India atau yang biasa dikenal dengan NCRB, melaporkan bahwa pada tahun 2020, terdapat sejumlah 398.620 orang yang ditangkap (arrested) sebagai pelaku kejahatan terhadap perempuan (Murali 2021). Dimana 30,2% dari jumlah pelaku tersebut merupakan suami, keluarga hingga kerabat dari korban. Tidak hanya itu, terdapat sejumlah 488.143 orang yang

didakwa (charge-sheeted) serta 31.402 orang yang dihukum (convicted) atas kejahatan terhadap perempuan atau crime against women. Sementara itu, terdapat total 19,7% kasus penganiayaan terhadap perempuan, 19% kasus penculikan perempuan dan kasus pemerkosaan sebesar 7,2% (Murali 2021).

2.5. Analisis Ketimpangan Gender Terhadap Pekerja Perempuan Sektor Informal India

Berdasarkan definisi dari ILO, seorang individu dapat dikatakan sebagai pekerja informal apabila hubungan kerja secara hukum maupun praktik, tidak sesuai dengan kaidah UU Ketenagakerjaan, tidak sesuai dengan pajak penghasilan, perlindungan sosial atau hak atas imbalan kerja tertentu (cuti tahunan, pesangon dsb) (International Labour Organizations 2011).

“Employees are considered to have informal jobs if their employment relationship is, in law or in practice, not subject to labour legislation, income taxation, social protection or entitlement to certain employment benefits (advance notice of dismissal, severances of pay, paid annual or sick leave, etc.)”.

Sementara itu, National Commission for Enterprises in the Un-organised Sector (NCEUS) yang berposisi sebagai badan yang didirikan pemerintah India, mendefinisikan bahwa pekerja informal adalah mereka yang tidak mendapatkan manfaat berupa jaminan sosial oleh pemberi kerja (T.S. Papola 2007). Kemudian, pekerja informal turut didefinisikan pula sebagai individu yang bekerja di sektor swasta ataupun sektor rumah tangga yang tidak terorganisir (Ministry of Labour&Employment India 2013).

Di India, persentase perempuan yang bekerja di sektor informal berada di kisaran angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja informal laki-laki

yakni dengan total pekerja perempuan informal sebesar 81,8% (International Labour Office 2018). Tingginya angka perempuan yang bekerja di sektor informal India dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya ditinjau dari ketimpangan di faktor sosial ekonomi, serta ketimpangan dari faktor tingkatan edukasi. Secara keseluruhan, besaran angka pekerja informal di suatu negara memiliki keterkaitan erat dengan status maupun level ekonomi dan sosial suatu negara, dimana status ini diukur melalui *Human Development Index* (HDI). HDI dalam hal ini berfungsi sebagai indikator yang mengukur standar kehidupan suatu negara. Sehingga ketika suatu negara memiliki angka pekerja informal yang besar, maka dapat dipastikan nilai HDI negara tersebut berada di posisi yang rendah (International Labour Office 2018). Dalam hal ini, berdasarkan indikator HDI, India berada di posisi atau ranking 131 dari 189 negara pada tahun 2020 (The Hindu 2020).

Sementara itu, sebagaimana yang telah dituliskan sebelumnya, 40% dari perempuan India harus putus sekolah di usia 15-18 tahun sebab keterbatasan yang dihadapi dari sisi sosial dan ekonomi (Scroll In 2018). Hal ini menjadikan para perempuan tersebut memiliki pilihan yang terbatas dalam menentukan pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak dalam hal ini mengacu pada standar yang ditentukan oleh ILO, dimana ILO mendefinisikan pekerjaan layak adalah suatu pekerjaan produktif yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki, disertakan dengan kondisi yang memiliki kebebasan, kesetaraan, keamanan dan martabat manusia (International Labour Organizations 2011).

*“Productive work for women and men in conditions of freedom, equity, security
and human dignity”*

Sementara secara umum, definisi dari suatu pekerjaan dapat dikatakan layak apabila memenuhi syarat-syarat seperti mendapatkan penghasilan yang adil, menjamin bentuk pekerjaan serta kondisi kerja yang aman, serta memastikan pekerja bebas mengekspresikan diri dan berintegrasi sosial. Apabila dianalisa melalui karakteristik pekerja informal, maka di beberapa kasus, pekerja informal dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang tidak layak. Sebab karakteristik dari pekerja informal berlawanan dengan standar pekerjaan layak yang ditentukan oleh ILO.

Di India, perempuan dapat menjadi pekerja informal disebabkan oleh beberapa faktor, seperti diantaranya akibat faktor umur, tingkatan pendidikan hingga faktor area tempat tinggal (pedesaan vs perkotaan). Selama rentang tahun 2017-2018, *Periodic Labour Force Survey* (PFLS) menyatakan bahwa perempuan India yang tinggal di daerah pedesaan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk bekerja di sektor informal yakni sebesar 93,1%, dibandingkan perempuan yang tinggal di daerah perkotaan dengan kemungkinan angka sebesar 77,2% (IWWAGE 2021). Melihat dari besarnya kemungkinan perempuan yang tinggal di wilayah pedesaan untuk terlibat di sektor informal, memberikan gambaran bahwa sejatinya faktor area (*rural vs urban*) adalah faktor yang berpengaruh dalam menentukan besaran angka. Sehingga, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor pendidikan, kondisi ekonomi hingga stigma sosial memiliki peran yang saling berkaitan antar satu dan lainnya.

93,1% perempuan yang tumbuh dan berkembang di area pedesaan, memiliki peluang yang sangat terbatas terhadap akses menuju pendidikan, terutama pendidikan di level tinggi seperti Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan

tinggi (S. Menon 2020). Adanya stigma atau pandangan di sebagian besar masyarakat pedesaan India, bahwa perempuan tidak berkewajiban, bahkan tidak memiliki hak untuk menempuh pendidikan, terutama pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, mengakibatkan besarnya angka perempuan pedesaan untuk keluar dari sekolah dan bekerja di sektor informal. Sebagaimana yang disampaikan oleh NCPCR, 40% dari perempuan India dengan kisaran usia 15-18 tahun telah keluar dari sekolah serta 65% dari umur mereka telah terlibat dalam pekerjaan rumah tangga (Gohain 2020).

Tidak hanya disebabkan oleh stigma sosial, keterbatasan ekonomi masyarakat wilayah pedesaan juga menjadikan perempuan India tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Sebagaimana fenomena yang seringkali terjadi di negara berkembang, tingginya angka pekerja informal berkaitan erat dengan kemiskinan (Williams 2014). Fenomena ini mengindikasikan bahwa perempuan India memiliki nilai kesejahteraan, terutama kesejahteraan secara ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dapat terlihat dari angka pekerja informal perempuan yang lebih tinggi daripada pekerja informal laki-laki. Selain itu, terhambatnya akses perempuan dalam mendapatkan edukasi di tingkatan yang lebih tinggi, turut menjadi penghalang bagi sebagian perempuan India untuk meningkatkan skill/kemampuan yang dimiliki (Hill 2010). Rendahnya kapabilitas yang dimiliki pada akhirnya menjadikan perempuan memiliki pilihan pekerjaan yang terbatas, sehingga bekerja di sektor informal dengan jaminan kesejahteraan yang rendah menjadi opsi yang banyak dipilih oleh perempuan India (Atanu Sengupta 2013). Realita ini akan terus menjadi rantai yang sulit untuk diputuskan, sebab untuk memperbaiki stigma sosial masyarakat, diperlukan aksi

secara kolektif dan komprehensif tidak hanya dari pemerintah India, melainkan juga dari masyarakat India itu sendiri.

Di India, perempuan selalu terlibat dalam berbagai aktivitas produktif maupun reproduktif (pekerjaan rumah tangga). Namun stigma sosial akibat gender bias yang terjadi di India, menyebabkan keterlibatan para perempuan pekerja sektor informal tersebut seringkali dipandang sebelah mata dan tidak terlihat, serta rentan mengalami situasi yang merugikan. Pekerja perempuan berbasis rumahan (home-based workers) dan perempuan yang bekerja di ranah rumah tangga (contributing family workers) adalah sebagian diantara pekerja perempuan yang menjadi korban bias gender. Sebab selain mendapatkan bayaran upah yang rendah, figur perempuan tersebut bahkan tidak memiliki jaminan keamanan dan kesejahteraan dari pekerjaannya.

Bargaining power atau kekuatan tawar menawar adalah hal yang sulit untuk dilakukan oleh pekerja perempuan informal India, sebab kembali ke stigma sosial, perempuan India dipandang memiliki status sosial yang rendah, sehingga tidak memiliki daya kuasa untuk menuntut hak yang seharusnya didapatkan, sebagaimana yang disampaikan oleh *Strengthening Socio-Economic Rights of Women in the Informal Economy (IWWAGE)* dan *Self-Employed Women's Association (SEWA)* pada laporan bulan Oktober, 2020 (Ayushi Gupta 2020).

2.6. Sejarah Munculnya Self Employed Women's Association (SEWA)

Runtutan fenomena akibat stigma sosial dan bias gender yang dirasakan perempuan India, mulai dari ketimpangan dalam akses pendidikan, ketimpangan ekonomi (mendahulukan anak laki-laki untuk disejahterakan) pada akhirnya menjadikan perempuan semakin kesulitan dalam menentukan pilihan, dimana

pilihan tersebut bahkan telah terbatas sejak awal. Melalui pernyataan ini, berbagai Non-Governmental Organization (NGO) di India pun hadir untuk melawan fenomena sosial yang ada terkait perempuan India. Oleh sebab penelitian ini fokus membahas pekerja perempuan informal, maka NGO yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah NGO yang melakukan pergerakannya di sektor tersebut, yakni *Self-Employed Women's Association* atau yang biasa dikenal dengan SEWA.

SEWA diresmikan sebagai NGO (*trade union*) pada tahun 1972 sebagai bentuk pengembangan dari *Women's Wing of the Textile Labour Association* (TLA) yang didirikan oleh Mahatma Gandhi dan Anasuya Sarabhai pada tahun 1920 (Rose 1992). TLA yang saat itu terfokus untuk menangani masalah pekerja di bidang yang terorganisir dan formal (pekerja yang terafiliasi dengan perusahaan tertentu) dipandang tidak begitu mewakili serta merepresentasikan kepentingan dan kebutuhan dari para perempuan yang bekerja di sektor informal (Barua 2015). Sehingga Ela Bhatt bersama 600 pekerja perempuan pada saat itu memutuskan untuk melepas keterkaitan dengan TLA dan membentuk SEWA menjadi NGO yang bergerak secara mandiri (Rose 1992).

Pada awal kinerjanya di tahun 1972, pemerintah India tidak mengakui keberadaan SEWA sebab para pekerja yang tergabung di dalam SEWA dikategorikan oleh pemerintah sebagai pekerja yang tidak sah dan tidak termasuk pekerja yang diakui oleh hukum negara, terlebih lagi untuk dipandang sebagai kontributor dalam sektor ekonomi India. Berbagai jenis pekerjaan yang dikategorikan oleh pemerintah India sebagai pekerja tidak sah ataupun dikategorikan sebagai *self-employed women* diantaranya adalah: penjahit, pengrajin, pelukis, hingga para perempuan yang berdagang di pasar dan di jalanan

India (pedagang kaki lima) (Hill 2010). Selain dipandang sebagai pekerjaan yang tidak sah oleh pemerintah India, para perempuan yang bekerja sebagai self employed women ini turut dikenai denda oleh kepolisian India, bahkan ketika upah yang mereka dapatkan dari bekerja tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari (Dave 2017).

Sikap pemerintah India yang tidak mengakui pekerjaan di sektor informal, merupakan tindakan mengecewakan bagi 96% pekerja perempuan India pada saat itu. Hal ini disebabkan, pada saat awal resmi dibentuknya SEWA tahun 1972, sekitar 96% perempuan India merupakan pekerja di sektor informal, sementara sisa 4% dari pekerja perempuan tersebut termasuk dalam kategori pekerja di sektor formal, atau dalam kata lain, memiliki hubungan *employe-employed*.

2.6.1 Fungsi dan Kinerja SEWA Terhadap Pekerja Perempuan Sektor Informal India

Seiring berkembangnya SEWA selama kurang lebih 49 tahun (1972-2021), kiprah SEWA yang awalnya memastikan hak para pekerja perempuan yang bekerja di sektor informal didapatkan dengan penuh dan adil, kini terus mengalami perkembangan. SEWA saat ini tidak hanya terfokus pada pemenuhan hak pekerja perempuan, melainkan turut memfokuskan pergerakannya pada proses pemberdayaan, serta mengajarkan tentang bagaimana perempuan mempersiapkan

berbagai inovasi serta menciptakan peluang (Datta 2000). Fokus SEWA yang berkembang kemudian mengarahkan SEWA untuk memperluas kinerjanya melalui berbagai gerakan seperti gerakan pekerja, gerakan kooperatif hingga gerakan perempuan. Berbagai gerakan tersebut dilakukan oleh SEWA dalam rangka

mencapai tujuan utamanya, diantaranya adalah menjadikan para anggota SEWA serta pekerja perempuan India mendapatkan rekognisi, tidak hanya rekognisi dari pemerintah India melainkan juga dari masyarakat Internasional. Tidak hanya itu, keberadaan SEWA juga ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dari pekerja perempuan India terutama dari sisi ekonomi. SEWA percaya bahwa proses pemberdayaan akan lebih mudah untuk dijalankan apabila perempuan India mampu mandiri secara finansial, terutama dengan memanfaatkan potensi dari sumber daya yang ada.

Selain untuk mendapatkan rekognisi dan mandiri secara ekonomi, tujuan lain didirikannya SEWA adalah untuk mengatur para pekerja perempuan informal agar mampu secara bersama-sama membentuk pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, SEWA membantu para perempuan untuk menemukan prinsip hidup mereka, untuk menemukan suara serta harapan yang selama ini terpendam akibat stigma masyarakat serta pemerintah terhadap pekerjaan mereka. SEWA berfungsi sebagai pendorong perempuan India dalam menambah kompetensi mereka, sebab adanya peningkatan kompetensi akan membantu membuka serta menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi pekerja perempuan India. Lapangan pekerjaan yang meningkat serta skill yang terasah akan membantu pekerja perempuan india untuk menambah pemasukan (Atanu Sengupta 2013).

2.7. Keterkaitan SEWA dengan *Holistic Development*

Bias gender dan stigma sosial yang sudah sangat mengakar di dalam struktur sosial masyarakat India menjadikan isu ketimpangan serta pemberdayaan perempuan merupakan isu yang sensitif untuk dibahas. Selain itu, isu

pemberdayaan sulit untuk dipraktekkan terkecuali isu pemberdayaan telah menjadi isu yang setara dengan hukum di negara tersebut. Dalam hal ini, justru NGO seperti salah satunya SEWA, yang secara kolektif mengadakan serta mengarahkan pembangunan di masyarakat dengan konsep berbasis pemberdayaan holistik. Konsep pemberdayaan holistik ini terlihat ketika SEWA melakukan pergerakan yang menyeluruh dan komprehensif, tidak hanya fokus ke dalam pemberdayaan ekonomi, penyetaraan akses terhadap perempuan, namun juga bergerak memberdayakan perempuan dengan meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Pemberdayaan yang dilakukan SEWA secara perlahan memperluas pintu keterbatasan yang awalnya dimiliki oleh perempuan India.

Meski pergerakan SEWA seringkali mengalami berbagai hambatan serta tantangan di dalam ruang lingkup nasional India, kinerja SEWA yang gencar dalam melakukan advokasi terkait urgensi pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak-hak kesejahteraan pekerja informal perempuan India di ruang lingkup internasional, menjadikan masyarakat serta aktor internasional terus mendesak pemerintah India agar dapat menanggapi urgensi yang dibawakan oleh SEWA tersebut. Hingga kemudian, Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India menyatakan keseriusannya dalam mengakhiri isu ketimpangan dan diskriminasi gender di India mulai tahun 2020. Dimana pada tahun 2020, India mulai membentuk arah pembangunan dengan konsep holistic atau dikenal dengan *holistic development*, tepatnya yakni pembangunan ataupun perkembangan di masyarakat dari aspek intelektual, mental, fisik, hingga kemampuan sosial guna menghadapi berbagai tantangan (Business Standard 2020).

“We should collectively work towards an India where there is no discrimination based on gender and where girls get all opportunities to shine”

Melalui konsep *holistic development*, Modi menyatakan bahwa konsep ini tidak dapat tercapai maupun berjalan secara maksimal apabila tidak disertai dengan adanya penyelesaian terkait isu ketimpangan gender di India (All India 2020). Maka dari itu, Modi kembali mengatakan bahwa pemerintah India berkomitmen dalam melakukan pembangunan holistik dengan menjamin untuk mengatasi ketimpangan gender melalui regulasi atau aturan yang berlaku di India. Founder dari SEWA, Bhatt menyatakan bahwa para perempuan pekerja mandiri riskan untuk mengalami ketidakadilan dalam dunia kerja, sebab minimnya edukasi, mereka tidak sadar penuh atas hak mereka. SEWA dibangun bukan atas prinsip melawan suatu kelompok, melainkan menggunakan kekuatan kolektif untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kondisi kerja dan hidup para perempuan pekerja.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa agar dapat mencapai pemberdayaan perempuan secara maksimal di India, pemerintah sebagai salah satu aktor utama harus mengadakan aksi secara kolektif. Aksi secara kolektif ini tidak hanya berkisar membicarakan perihal kesetaraan gender dan keadilan gender, melainkan turut membuka peluang ataupun kesempatan kerjasama yang setara bagi perempuan untuk andil dalam pertumbuhan, serta tentang bagaimana perempuan dapat menjadi dirinya sendiri.

2.7.1 Dinamika Pekerja Perempuan Sektor Informal India Pasca Holistic Development Narendra Modi

Keberhasilan SEWA dalam mengembangkan advokasinya melalui rencana kerja/aksi hingga di tingkat internasional, terbukti ketika pada tahun 2020, Narendra Modi mulai membentuk arah pembangunan dengan konsep *holistic development* atau pembangunan holistik. Dimana sejak awal terbentuknya SEWA, konsep ini telah menjadi panduan SEWA dalam melakukan pergerakannya, baik di tingkat nasional hingga internasional. Penerapan konsep holistik oleh pemerintah India, merupakan pertanda terbukanya ruang-ruang diskusi terhadap berbagai isu serta resolusi yang ditawarkan oleh SEWA. Konsep pembangunan holistik yang sejalan dengan prinsip SEWA, memberikan kemudahan bagi SEWA untuk memahami pergerakan pemerintah India, serta memberikan kemudahan untuk mengawasi pergerakan pemerintah dalam mengatur ulang kebijakan yang berkenaan dengan pekerja informal.

Dalam pidatonya di Konferensi Yudisial Internasional pada Februari 2020, Narendra Modi menyatakan bahwa tidak ada satu negara atau masyarakat manapun yang dapat mencapai pembangunan holistik apabila tidak disertai dengan keadilan gender (NDTV 2020). Tidak hanya itu, Modi turut menegaskan bahwa Konstitusi menjamin keadilan gender berdasarkan ketentuan hak atas kesetaraan (NDTV 2020). Keputusan Modi dalam mengeluarkan kebijakan pembangunan holistik di India, sejalan dengan agenda yang telah disahkan oleh UN Women pada tahun 2015, yakni agenda pembangunan berkelanjutan atau *Agenda for Sustainable Development*. Terdapat beberapa target dalam agenda tersebut, diantaranya target nomor 5 yakni mencapai kesetaraan gender, serta target nomor 8 yakni untuk

mempromosikan lapangan pekerjaan produktif yang dapat diakses secara penuh (Colglazier 2015).

Mengacu pada konsep pembangunan holistik yang dicanangkan pada tahun 2020 serta agenda pembangunan berkelanjutan UN Women pada tahun 2015, pemerintah India memulai pergerakannya dalam memperbaiki isu perempuan pekerja informal dengan mengimplementasikan pemberdayaan terhadap perempuan di berbagai sektor (Multi sectoral schemes), tepatnya pemberdayaan secara intelektual, mental, fisik pada sektor ekonomi, sosial hingga politik. Sistem pemberdayaan antar sektor ini, tidak hanya diimplementasikan sebab memiliki prinsip yang sejalan dengan pembangunan holistik. Melainkan, pemerintah India memandang bahwa pemberdayaan di berbagai sektor tersebut dapat menjadi ajang memperkenalkan potensi ideal dari para perempuan India, serta diharapkan mampu menjadi pembuka jalan bagi perempuan India untuk berkontribusi secara penuh terhadap pertumbuhan India (Eliza Sharma 2021).

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa pemberdayaan yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan di faktor ekonomi, sosial hingga politik, mampu memberikan sumbangsuhnya bagi kesejahteraan perempuan pekerja informal di India. Sebab faktor-faktor yang mulanya menjadi tantangan bagi para perempuan pekerja informal, kini menjadi faktor yang turut diperhatikan oleh pemerintah. Maka dari itu, berdasarkan laporan dari Strategy for New India @75, terdapat berbagai tahapan yang dilakukan pemerintah India dalam menjamin terciptanya pembangunan holistik yang disertai dengan keadilan gender (Government of India 2018). Berbagai tahapan tersebut secara keseluruhan turut

memperbaiki status kesejahteraan dari perempuan pekerja informal di India, diantaranya adalah:

1. Memastikan terciptanya pemikiran peka gender (*gender-sensitive thinking*) pada UU dan kebijakan yang dibuat, sembari memperhatikan tantangan lain yang dihadapi oleh para perempuan (cth: tingkatan edukasi, ekonomi, wilayah tinggal).
2. Memperkuat kerangka hukum atau UU untuk perempuan pekerja informal dengan memastikan penetapan upah minimum, tunjangan hamil, hingga perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan di lingkungan kerja.
3. Mendorong partisipasi perempuan dalam industri dan perusahaan, serta meningkatkan keterampilan perempuan.

Tidak cukup dengan melakukan pemberdayaan antar sektor, pemerintah India turut mengarahkan pemberdayaan perempuan India yang awalnya berkonsep *women development* hingga menjadi *women-led development* (Government of India 2018).

Rancangan *women-led development* ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan holistik yang dirumuskan oleh Modi. Sehingga dari berbagai kebijakan yang telah dirancang, diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para perempuan pekerja informal India. Sehingga perempuan pekerja informal mampu memberikan kontribusi yang lebih maksimal kepada arus ekonomi India, sekaligus menjadi lebih aman atas kemerdekaan dalam nilai-nilai ekonomi, politik dan sosial masyarakat sebab telah mampu independen dan menjangkau sistem yang mulanya terbatas.

BAB III
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERGERAKAN
ADVOKASI SEWA TERHADAP ISU PEREMPUAN PEKERJA
INFORMAL DITINJAU DARI TEORI ADVOKASI

Berdasarkan kinerjanya sebagai salah satu NGO, SEWA mengimplementasikan berbagai strategi yang kolaboratif dalam mencapai tujuannya. Salah satu langkah yang diterapkan oleh SEWA dalam memenuhi resolusi yang dituju adalah dengan menjalankan berbagai tahapan advokasi, dimana berbagai tahapan tersebut dilakukan dengan menerapkan asas advokasi. Asas tersebut diantaranya yakni pertama, asas *Contextualization* untuk memaparkan definisi advokasi serta memaparkan tujuan dilakukannya advokasi. Kedua, membuka ruang dialog terkait agenda yang sedang diusahakan dengan menerapkan asas *Empowerment*. Ketiga, menerapkan asas *Collectivity* untuk melakukan pengembangan terhadap rencana kerja/aksi. Tidak hanya itu, SEWA juga melakukan negosiasi strategis bersama pemerintah India, hingga mengadakan negosiasi transnasional (lintas batas) bersama aktor dari berbagai negara. Sehingga melalui bab ini, akan dipaparkan secara lebih deskriptif terkait berbagai proses advokasi yang dilakukan oleh SEWA serta berbagai strategi yang dilakukan, baik dalam ruang lingkup nasional hingga ruang lingkup internasional ditinjau melalui perspektif advokasi.

3.1. Penerapan Asas *Contextualization*

Keputusan SEWA untuk lepas dari TLA menjadikan SEWA membentuk hubungan baru dan merumuskan ulang regulasinya sesuai visi misi SEWA. Langkah tersebut membantu SEWA menjadi sebuah NGO yang inklusif, bekerja dengan merespons berbagai aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan para perempuan pekerja informal di India. Pertumbuhan SEWA yang bersifat dinamis, menjadikan NGO ini sebagai sebuah organisasi yang *self-sustaining* dan memiliki nilai-nilai demokratis. Namun upaya SEWA selama menjalankan advokasi seringkali mengalami penolakan, terutama penolakan dari pemerintah India itu sendiri. Adanya perbedaan persepsi antara kelompok sosial bersama pemangku kebijakan, mempersulit terjalannya komunikasi efektif guna membahas isu perempuan pekerja Informal. Salah satu persepsi yang menyulitkan proses SEWA dalam menjalankan advokasi yakni adanya pandangan bahwa organisasi yang beranggotakan perempuan dan membahas isu perempuan adalah organisasi yang tidak cukup kompeten dalam membawa perubahan. Hal ini diakibatkan sebab SEWA merupakan organisasi pertama yang memfokuskan pergerakannya di sektor pekerja informal, dengan membawa perempuan sebagai tokoh utama pergerakannya (Datta 2000). Hal inilah yang kemudian semakin mempersulit dinamika SEWA dalam mengumandangkan ide-ide kesejahteraan perempuan pekerja informal di India.

Tidak hanya itu, nilai-nilai pemberdayaan yang dibawakan SEWA, seringkali berbenturan dengan budaya tradisional India, terlebih ketika patriarki telah menjadi budaya yang mengakar dalam kondisi sosial masyarakat itu sendiri. Hal ini mempersulit upaya SEWA dalam mengangkat isu perempuan pekerja informal di India. Maka dari itu, guna mencapai visi misi SEWA, SEWA memulai

pergerakannya dengan memberikan pemaparan terlebih dahulu kepada masyarakat hingga pemerintah terkait tujuan advokasi SEWA yang sebenarnya. Adapun langkah SEWA dalam memaparkan tujuannya ke khayalak luas yakni dengan menyamakan persepsi masyarakat India terkait ide pemberdayaan perempuan yang seringkali dipandang negatif melalui penerapan asas *contextualization* yang merupakan perkembangan teori advokasi oleh Rose (1990).

Sejak Narendra Modi menjabat sebagai Perdana Menteri di tahun 2014, terdapat berbagai langkah yang semakin gencar dilakukan oleh SEWA dalam mengumandangkan ide-ide advokasinya, salah satunya adalah dengan menerapkan asas *contextualization* berupa persamaan persepsi. Persamaan persepsi ini dilakukan dengan cara membuka berbagai ruang dialog, dimana dibukanya ruang dialog ini berguna dalam mengumpulkan berbagai opini yang telah ada di masyarakat terkait isu perempuan pekerja informal (Rose, 1990, pp. 45-49). Sehingga, opini tersebut dapat ditinjau ulang dan SEWA mampu menyediakan informasi atau fakta yang dibutuhkan dalam mewujudkan persamaan persepsi di masyarakat/pemerintah/kelompok sosial. Langkah yang dilakukan SEWA dalam menerapkan asas *contextualization* ini diantaranya adalah:

Tabel 1. Penerapan Asas *Contextualization* SEWA 2015-2021

Bentuk Penerapan Asas	Persepsi/Tujuan yang Disampaikan	Tahun Penerapan Asas
Menginiasi “ <i>Global Home-based Workers Conference</i> ”	Menghadirkan para perempuan pekerja informal untuk memberikan pemahaman terkait hak mereka sebagai pekerja	2015
Mengadakan <i>workshop</i> “ <i>Informal Livelihoods and Inclusive Planning</i> ”	Memberikan <i>insight</i> terhadap peran dari pekerja informal serta	2015

	kontribusinya dalam tingkat rumah tangga, lokal hingga nasional	
Mengadakan webinar “ <i>Home-based Workers, Invisible and Voiceless</i> ”	Menyampaikan isu perempuan pekerja informal serta menyampaikan hak mereka sebagai pekerja	2016
Mengisi program radio terkait pekerja informal “ <i>Kal ki Subah Humari Hai (Tomorrow is Ours)</i> ”	Memberikan pemahaman terhadap isu pekerja informal kepada masyarakat umum serta urgensi dilakukannya advokasi terkait isu tersebut	2017
Mengadakan <i>workshop</i> “ <i>Making Cities Work for All: Integrating the Informal Economy</i> ”	Mendengarkan kebutuhan dari para pekerja informal serta menyampaikan tujuan dari advokasi	2018
Mengikuti “ <i>The Commission on the Status of Women (CSW)</i> ”	Mempromosikan isu perempuan pekerja informal, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	2019
Mengadakan panel “ <i>Informality of COVID-19 in South Asia</i> ”	Menginformasikan dinamika perempuan pekerja informal di masa pandemic covid-19	2020
Mengorganisir series webinar “ <i>Workers’s Voices Webinars</i> ”	Mendengarkan kebutuhan para perempuan pekerja informal, mendiskusikan pengalaman serta membahas <i>innovative policy, organizing strategis</i> hingga advokasi selama pandemic Covid-19	2021

Sumber: (WIEGO, 2015-2021)

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rose dalam jurnalnya, bahwa ketika asas *contextualization* telah di-implementasikan dengan membuka kesempatan bagi kelompok sosial untuk dapat mengekspesikan, mengelaborasi, mengungkapkan dan berpikir kritis terhadap konteks permasalahan atau isu yang

menjadi pokok pembahasan (Rose, 1990, pp. 45-49). Maka ruang dialog akan menjadi lebih terbuka dan akar permasalahan dapat dibahas secara lebih spesifik (Rose, 1990, pp. 45-49). Sehingga, mengutip dari perspektif tersebut, upaya yang dilakukan SEWA dalam membuka ruang-ruang diskusi kepada para perempuan pekerja informal, merupakan langkah awal yang sangat penting agar tahapan advokasi selanjutnya dapat dijalankan secara lebih terarah.

3.2. Penerapan Asas *Empowerment*

Jika dikutip dari jurnal karya Rose (1990), asas *Empowerment* ini digunakan ketika asas *contextualization* telah di-implementasikan di awal tahapan advokasi (Rose, 1990, pp. 49-50). Rose (1990) menyatakan bahwa persamaan persepsi terkait isu yang menjadi fokus pergerakan, adalah pintu awal berdayanya kelompok sosial tersebut. Sehingga, tahapan advokasi dapat dilanjutkan dengan menerapkan asas *Empowerment*, yakni dengan memberdayakan kelompok sosial untuk meningkatkan power dari kelompok tersebut (Rose, 1990, pp. 49-50). Rose menyatakan bahwa konsep pemberdayaan dalam asas ini dapat dilakukan dengan membuka ruang sebesar-besarnya serta menjalin komunikasi yang efisien guna mendorong kelompok sosial dalam menyampaikan kebutuhan mereka.

Tidak hanya itu, Rose (1990) turut menyatakan bahwa dalam menjalankan asas *Empowerment*, kelompok sosial tersebut harus diberikan pemahaman bahwa hak adalah aspek yang harus ditentukan oleh diri mereka sendiri, serta pemahaman bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan akan memberikan dampak besar bagi kehidupannya (Rose, 1990, pp. 49-50). Penerapan asas ini juga mengarahkan para kelompok sosial untuk dapat bertanggung jawab dalam mengembangkan serta mengelaborasi ide-ide yang didapatkan selama terbukanya ruang dialog, sebab

kemampuan mengambil tindakan/aksi dapat meningkatkan *power* dari kelompok sosial tersebut. Adanya peningkatan *power* ini mempermudah kelompok sosial dalam melakukan penuntutan terhadap berbagai resolusi yang diajukan kepada pemangku kebijakan (Rose, 1990, pp. 49-50).

Terdapat berbagai program kerja yang dilakukan oleh SEWA dalam menjalankan asas *Empowerment* ini, sebagian diantaranya dilakukan dengan memanfaatkan platform yang telah ada di SEWA, seperti diantaranya SEWA Video dan SEWA Bank. Berikut berbagai program kerja yang dijalankan SEWA dengan menerapkan asas *Empowerment* pasca kepemimpinan Modi 2015-2021:

Tabel 2. Penerapan Asas *Empowerment* SEWA 2015-2021

Bentuk Penerapan Asas	<i>Empowerment</i> yang dijalankan	Tahun Penerapan Asas
Mengadakan program “ <i>Increase Voice, Increase Visibility, Increase Validity</i> ”	Melakukan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan pekerja informal dengan menerapkan 5 program kerja	2015
Menginisiasi “ <i>Global Child Care Campaign</i> ”	Memberdayakan para perempuan pekerja informal tentang hak asuh anak yang belum/telah menjadi bagian <i>national protection system</i>	2016
Menjadi salah satu inisiator “ <i>UN High-Level Panel on Women’s Economic Empowerment</i> ”	Menjalin diskusi interaktif beragendakan kesetaraan gender dan peningkatan ekonomi perempuan sesuai SDG’S 2030	2017
Menginisiasi terbentuknya “ <i>WIEGO’s 5 year Plan 2018-2023</i> ”	Merancang agenda pemberdayaan perempuan pekerja informal	2018

Membuka ruang dialog “ <i>Sisterhood: How Solidarity Led Indian Women to Take on Gender Discrimination</i> ”	Memberdayakan perempuan pekerja informal terhadap isu-isu berkaitan dengan diskriminasi gender	2019
Menginisiasi terbentuknya buku “ <i>The Informal Economy Revisited: Examining the Past, Envisioning the Future</i> ”	Memberikan pemahaman terhadap aspek-aspek yang diperlukan oleh para perempuan pekerja informal untuk dapat memerdekakan diri sendiri dan memenuhi hak-haknya	2020
Membentuk koalisi “ <i>Main Bhi Dilli (I, Too, am Delhi)</i> ” Campaign	Memberdayakan para kelompok sosial dan perempuan pekerja informal untuk memaksimalkan potensinya dalam menuntut resolusi kebijakan	2021

Sumber: (WIEGO, 2015-2021)

Sebagaimana yang disampaikan oleh Rose (1990), penerapan asas *empowerment* penting untuk dijalankan agar kelompok sosial dapat memahami secara sistematis terkait isu yang sedang menjadi fokus pergerakan (Rose, 1990, pp. 49-50). Dalam hal ini, SEWA menyadari pentingnya komunikasi yang terbuka antara para perempuan pekerja informal, serta pentingnya mengakui eksistensi dari para pekerja tersebut. Sehingga mereka dapat saling memberdayakan potensi yang mereka miliki satu sama lain. Adanya penerapan asas pemberdayaan ini diharapkan dapat memaksimalkan SEWA dalam menuntut resolusi kebijakan terkait isu perempuan pekerja informal India.

3.3. Penerapan Asas *Collectivity*

Tahapan ketiga dari proses advokasi adalah menerapkan asas *collectivity*, yakni dengan melakukan pengembangan terhadap rencana kerja/aksi dalam melaksanakan proses advokasi (Rose, 1990, pp. 49-50) Tahapan ini dilakukan ketika tujuan advokasi telah tersampaikan ke beberapa target audiensi, pemberdayaan kelompok sosial telah dilakukan dan kerjasama telah terjalin dalam ruang lingkup yang lebih luas (Rose, 1990, pp. 49-50). Dalam hal ini, advokasi SEWA baru sampai ke kelompok masyarakat dan kelompok non-pemerintahan lainnya, sementara pemerintah India masih belum terlihat konsisten dalam mempersamai pergerakan SEWA mensejahterakan perempuan pekerja informal. Sehingga kemudian, SEWA mulai menjalankan advokasi tahapan ketiga, yakni dengan mengembangkan rencana kerja atau aksi advokasinya melalui penerapan asas *collectivity*. Adapun berbagai pengembangan rencana kerja/aksi SEWA selama menjalankan asas *collectivity* adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penerapan Asas *Collectivity* SEWA 2015-2021

Bentuk Penerapan Asas	Pengembangan Rencana Kerja/Aksi yang dijalankan	Tahun Penerapan Asas
Membantu <i>build capacity for Homenet South Asia</i> serta member organisasinya dan para kelompok pekerja	Melakukan pelatihan skill kepada para perempuan pekerja informal untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari	2015
Menginisiasi “ <i>Homework Protection Act Campaign</i> ”	Menuntut adanya pembayaran upah minimum, asuransi kesehatan, perlindungan kerja dan berbagai hak fundamental pekerja lainnya.	2016

Menginisiasi diadakannya “ <i>Regional Conference of City Authorities and Home-Based Workers</i> ”	Menjelaskan dampak pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari terhadap produktivitas serta kualitas hidup para perempuan pekerja informal	2017
Menginisiasi <i>Workshop on Child Care for Informal Workers</i>	Mendorong pengadaan <i>childcare</i> bagi para perempuan pekerja informal	2018
Membentuk dan mengadakan workshop terkait “ <i>Toolkit on ILO Convention C189</i> ”	Mendorong diadopsinya C189 terkait kesejahteraan pekerja informal	2019
Menginisiasi workshop “ <i>Delhi Roundtable on Solid Waste Management</i> ”	Menuntut diberikannya kartu identitas serta perlindungan sosial bagi para <i>waste pickers</i> (pemulung)	2020
Menginisiasi agenda “ <i>Extending Social Protection to Women and Men in the Informal Economy</i> ”	Menuntut diberikannya hak perlindungan sosial bagi para pekerja informal	2021
Bekerjasama merancang <i>Delhi Master Plan</i>	Berkolaborasi menyertakan ide bersama <i>urban planners, activist</i> dan <i>workers group</i> untuk membahas isu perempuan pekerja informal	2021

Sumber: (WIEGO, 2015-2021)

Pengembangan rencana kerja ini dijalankan oleh SEWA disertai dengan pelaksanaan aksi yang bermuatan politis, sejalan dengan pernyataan Rose melalui jurnalnya, sebab mengandung tuntutan kepada pemerintah untuk merubah beberapa kebijakan (Rose, 1990, pp. 49-50). Dimana asas ini diterapkan oleh SEWA guna memaksimalkan advokasinya dalam mencapai kesejahteraan perempuan pekerja informal di India. Melalui pengembangan rencana kerja/aksi ini, proses advokasi yang dijalankan SEWA semakin memberikan penekanan yang nyata terhadap

pemerintah India, serta mendorong terciptanya kebijakan baru hingga pada tahun 2020, Narendra Modi mulai mengarahkan pembangunan India dengan menerapkan konsep pembangunan Holistik yang peka gender dan mengatur ulang kebijakan yang lebih memberikan kesejahteraan bagi perempuan pekerja informal India.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Melihat dari proses advokasi SEWA melalui berbagai tahapan di level nasional dan internasional dengan menerapkan tiga asas advokasi. Dapat dinyatakan bahwa aksi yang berjalan secara kolaboratif serta komunikasi yang berjalan secara efektif antar SEWA bersama aktor internasional lainnya, memberikan pengaruh yang nyata terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemangku kepentingan. Dampak dari penerapan asas ini terlihat melalui tabel berikut:

Tabel 4. Penerapan Tiga Asas Advokasi Stephen M. Rose

Tahapan Asas Advokasi	Definisi oleh Rose	Implementasi SEWA
<i>Contextualization</i>	Persamaan Persepsi terkait proses advokasi yang akan dan sedang dijalankan, serta penyampaian tujuan advokasi dilakukan .	Membuka berbagai ruang dialog kepada para perempuan pekerja informal, masyarakat umum, kelompok sosial, pemangku kebijakan dan membahas terkait persepsi perempuan pekerja informal
<i>Empowerment</i>	Memberdayakan objek yang menjadi fokus advokasi serta kelompok sosial yang terlibat	Memberdayakan para perempuan pekerja informal hingga berbagai kelompok non-pemerintah agar lebih berdaya dalam menyampaikan resolusi terkait advokasi SEWA
<i>Collectivity</i>	Melakukan pengembangan rencana	Memberdayakan para perempuan pekerja

	kerja/aksi untuk mendorong tercapainya resolusi dari advokasi	informal hingga berbagai kelompok non-pemerintah agar lebih berdaya dalam menyampaikan resolusi terkait advokasi SEWA Menjalinkan kerjasama dengan lebih luas kepada berbagai kelompok sosial di luar SEWA, mengadakan aksi-aksi simbolis, mengembangkan rencana kerja seperti mengadakan workshop untuk ratifikasi C189
--	---	---

Sumber: (Rose, 1990)

Membaiknya jalur komunikasi serta kerjasama antara pemerintah, masyarakat sosial, NGO, sektor swasta hingga organisasi bantuan internasional menjadikan pemerintah India kini telah membentuk program yang difokuskan khusus untuk pemberdayaan perempuan atau yang dikenal dengan women-centred program, dimana salah satu pergerakannya fokus ke dalam pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Pasca advokasi SEWA, Pemerintah India kini menyadari bahwa untuk dapat mencapai pemberdayaan perempuan yang optimal, diperlukan penerapan pemberdayaan holistik dengan memperhatikan berbagai aset seperti pembentukan karakter, pola pikir, serta kemampuan (skill) baik secara individual maupun secara kolektif.

Hasil yang diharapkan dari proses pemberdayaan perempuan pekerja informal ini adalah perempuan mampu berdaya secara ekonomi. Dimana ketika perempuan mandiri secara ekonomi, maka perempuan tersebut dapat berkuasa penuh atas diri sendiri. Selain itu, pemberdayaan perempuan dalam aspek pendidikan akan menjadikan perempuan mampu berdaya secara pola pikir,

sehingga mengakibatkan perempuan menjadi kaum yang tidak lagi termarginalkan, serta paham atas hak dan kewajiban yang seharusnya didapatkan. Kemudian, pemberdayaan secara kesehatan akan mengarahkan perempuan sebagai individu yang mampu berdaya secara fisik, sehingga perempuan dapat lepas dari kekerasan, memiliki jasmani yang kuat untuk kemudian dapat lepas dari beragam praktik sosial di India yang merugikan perempuan.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di bab 1 hingga bab 3, penulis hendak memberikan beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Sebab, penulis menganalisa bahwa isu perempuan pekerja informal masih harus terus diperhatikan untuk mencapai pemberdayaan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Beberapa rekomendasi yang ditawarkan diantaranya adalah:

1. Penulis merekomendasikan penelitian selanjutnya dilakukan dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda dengan topik yang sama. Sebagaimana penelitian ini dilakukan dalam sudut pandang SEWA sebagai NGO, penelitian selanjutnya dapat menggunakan sudut pandang pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan decision maker dalam menganalisa pergerakan NGO terhadap isu yang dibawakan, dalam hal ini isu perempuan pekerja informal.

2. Penulis merekomendasikan penelitian lanjutan dengan topik pekerja informal, namun penelitian dilakukan dengan menganalisa aktor lain dari pelaku advokasi, sehingga tidak hanya NGO yang menjadi aktor yang dianalisa dalam penelitian topik ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alison Phipps, Jessica Ringrose, Emma Renold, Carolyn Jackson. "Rape culture, lad culture and everyday sexism: researching, conceptualizing and politicizing new mediations of gender and sexual violence." *Journal of Gender Studies*, 2017.
- All India. *Holistic Development Not Possible Without Gender Justice: PM Modi*. All India, 2020.
- Atanu Sengupta, Soumyendra Kishore Datta, Susanta Mondal. *Productivity, Separability and Deprivation: A Study on Female Workers in the Indian Informal Service Sector*. India: Springer India, 2013.
- Ayushi Gupta, Kanika Jha Kingra. *Strengthening Socio-Economic Rights of Women in the Informal Economy: The SEWA Approach in West Bengal and Jharkhand*. IWWAGE, 2020.
- B. R. Sharma, Manisha Gupta. "Gender Based Violence in India: A Never-ending Phenomenon." *Journal of International Women's Studies*, 2004: 114-123.
- Bannerji, Himani. "Patriarchy in the Era of Neoliberalism: The Case of India." *Social Scientist* Volume 44 (2016): 3-27.
- Barua, Rukmini. "The Textile Labour Association and Dadagiri: Power and Politics in the Working-Class Neighborhoods of Ahmedabad." *International Labor and Working Class History* Volume 87 (2015).
- BBC. *Is India really the most dangerous country for women?* BBC, 2018.
- BBC News. *Kasus pemerkosaan beramai-ramai terus muncul di India, mengapa kegentingan ini bisa terjadi?* BBC, 2019.
- Boeri, Natascia. "Challenging the Gendered Entrepreneurial Subject: Gender, Development, and the Informal Economy in India." *Gender&Society*, 2018.
- Bradley, Tamsin. *Challenging the NGOs: women, religion, and western dialogues in India*. London: I. B. Tauris, 2006.
- Burlet, Stacey. "Gender relations, 'Hindu' nationalism, and NGO responses in India." *Gender & Development* Volume 7 (1999): 40-47.
- Business Standard. *Modi govt committed to holistic development of weavers: Amit Shah*. Business Standard, 2020.
- Colglazier, William. "Sustainable development agenda: 2030." *Science* Volume 349, no. Issue 6252 (2015): 1048-1050.
- Collier, Paul. *Women in Development: Defining the Issues (Policy, Planning and Research Working Paper 129, Population and Human Resources Department*. World Bank, 1998.
- Daga, Nikita M. "Money to Call Her Own: An Empirical Study of the Relative Influence of Factors on Indian Women's Financial Independence." *International Journal of Humanities and Social Science*, 2021.
- Datta, Rekha. "On Their Own: Development Strategies of the Self-Employed Women's Association (SEWA) in India." *Development* Volume 43 (2000): 51-55.
- Dave, Janhavi. *The stories of the 37.4 million invisible and underpaid home-based workers in India*. Scroll In, 2017.
- DAWN. *Home-based women workers seek policy* . DAWN, 2016.

- Doshi, Vidhi. Why India's modern women say it's a 'burden' to be female. The Washington Post, 2018.
- Dr. J.R Raco, ME.,M.Sc. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Eileen Boris, Lisa Prugl. Feminization Through Flexible Labor. New York: Routledge, 1996.
- Eliza Sharma, Subhankar Das. "Integrated model for women empowerment in rural India." Journal of International Development Volume 33, no. Issue 3 (2021): 594-611.
- Erica Bornstein, Aradhana Sharma. "The righteous and the rightful: The technomoral politics of NGOs, social movements, and the state in India." Journal of the American Ethnological Society Volume 43 (2016).
- Femida Handy, Meenaz Kassam, Shree Renade. "Factors Influencing Women Entrepreneurs of NGOs in India." Nonprofit Management and Leadership Volume 13, no. Issue 2 (2003): 139-154.
- Gohain, Manash Pratim. 40% of girls aged 15-18 not attending school: Report. timesofindia, 2020.
- Gorringer, Hugo. "Afterword: Gendering Caste: Honor, Patriarchy and Violence." Caste-Gender Intersections in Contemporary India, 2018.
- Government of India. Strategy for New India@75. New Delhi: Government of India (NITI Aayog), 2018.
- Gutmacher Institute. "Abortion and Unintended Pregnancy in Six Indian States: Findings and Implications for Policies and Programs." 2018.
- H.Forbes, Geraldine. "Women and modernity: The issue of child marriage in India." Women's Studies International Quarterly Volume 2, no. Issue 4 (1979): 407-419.
- Hazarika, Dhruba. "Women Empowerment in India: A Brief Discussion." International Journal of Educational Planning & Administration Volume 1 (2011): 199-202.
- Hill, Elizabeth. Worker Identity, Agency and Economic Development Women's Empowerment in the Indian Informal Economy. London: Routledge, 2010.
- India News. Holistic Development Not Possible Without Gender Justice: PM Modi. India News, 2020.
- India Planning Commission. "National Policy on the Voluntary Sector." 2008.
- India Planning Commission. National Policy on the Voluntary Sector. Government of India Planning Commission, 2007.
- International Labour Office. Women and men in the informal economy : a statistical picture. International Labour Office, 2018.
- International Labour Organizations. C177 - Home Work Convention, 1996 (No. 177). International Labour Organizations, 1996, 1996.
- International Labour Organizations. Distinguishing the concepts: the informal sector, informal employment and the informal economy. International Labour Organizations, 2011.
- International Labour Organizations. "Self Employed Women's Association (SEWA), India." In Rural Employment and Decent Work Programme, by International Labour Organizations, 136. International Labour Organizations, 2011.

- Is India really the most dangerous country for women. BBC, June 28 2018.
- IWWAGE. "Women in the Indian Informal Economy." 2021.
- Kamdar, Bansari. India's Women Bear the Burden of Unpaid Work – With Costs to Themselves and the Economy. The Diplomat, 2020.
- Kapila, Pallavi. "Crimes against Women: An Overview of Indian scenario." In Gender Equality in Contemporary India: Issues and Challenges. New Era International Imprint, 2020.
- Kapoor, Aditi. "The SEWA way: Shaping another future for informal labour,." Futures Volume 39, no. Issue 5 (June 2007): 554-568.
- Kaushal, Mona. "Implementation of Right to Education in India: Issues and Concerns." Journal of Management & Public Policy Volume 4 (2012): 42-48.
- Ladage, Rutu. 10 Sexist Indian Marriage Customs That Need To Be Banned. India Times, 2017.
- Lal, B Suresh. "Child Marriage in India." International Journal of Science and Research (IJSR), 2013.
- Mareta, Sabillina. "Peran UN Women dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011- 2015." Jurnal Analisis Hubungan Internasional Volume 6, no. Nomor 2 (Agustus 2017).
- Margaret E.Keck, Kathryn Sikkink. "Transnational advocacy networks in international and regional politics." 1999.
- Marniati. "India Jadi Negara Paling Berbahaya untuk Perempuan." 2018. Menon, Sharanya. Education in India needs an overhaul. Idr Online, 2020.
- Menon, Sindhu. On Domestic Workers Day, millions of Indian women continue to work in the shadows. Equal Times, 2015.
- Mercer, Claire. "NGOs, civil society and democratization: a critical review of the literature." Progress in Development Studies Volume 2, no. Issue 1 (2002).
- Ministry of Labour&Employment India. "Employment in Informal Sector and Conditions of Informal Employment, Volume IV." 2013.
- Murali, Malavika. More than 370,000 cases of crimes against women reported in 2020, says govt. Hindustan Times, 2021.
- Narayan, Deepa. Empowerment and Poverty Reduction. The World Bank, 2002. National Crime Records Bureau Ministry of Home Affairs. "Crime in India 2018."
- Rose, S. M. (1990). Advocacy/Empowerment: An Approach to Clinical Practice for Social Work. *The Journal of Sociology & Social Welfare, Volume 17*(Issue 2), 45-50.
- Statistics Volume 1 (2019).
- NDTV. Holistic Development Not Possible Without Gender Justice: PM Modi. NDTV, 2020.
- Paola Pereznieto, Georgia Taylor. "A review of approaches and methods to measure economic empowerment of women and girls." Gender&Development Volume 22, no. Issue 2 (2014): 233-251.
- Purushothaman, Sangeeta. Empowerment of Women in India - Grassroots Women's Networks and the State. New Delhi, India: Sage Publications, 1998.
- R Maithreyi, Arathi Sriprakash. "The governance of families in India: education,

- rights and responsibility." *Comparative Education* Volume 54, no. Issue 3 (2018): 352-369.
- Rose, Kalima. *Where Women are Leaders: The SEWA Movement in India*. London: Zed Books Ltd, 1992.
- Saha, Amitava. "An Assessment of Gender Discrimination in Household Expenditure on Education in India." *Oxford Development Studies* Volume 41, no. Issue 2 (2013).
- Scroll In. 65% of adolescent girls who drop out of school do so to work at home or to beg, shows report. Scroll In, 2018.
- Sharma, Subhash. "Kautilaya to Modi: Governance Models from India." *Indus Business Academy*, 2017.
- Singh, Harmeet Shah. Why are so many children dying in India? CNN, 2015.
- Sinha, Shalini. *Supporting Women Home-Based Workers: The Approach of the Self-Employed Women's Association in India*. WIEGO , 2013.
- Srivastava, Anushree. "Role of Financial Independence in Uplifting the Status of Women." *International Journal Of Creative and Innovative Research In All Studies* Volume 3, no. Issue 7 (2020).
- T.S. Papola, K.P. Kannan. "Workers in the informal sector : initiatives by India's National Commission for Enterprises in the Unorganized Sector (NCEUS)." 2007.
- The Hindu. "India drops two ranks in Human Development Index." 2020.
- The Hindu. rethink higher education and its relationship with financial independence. thehindu.com, 2021.
- The New Indian Express. Holistic development not possible without gender justice: PM Narendra Modi. The New Indian Express, 2020.
- Tracey L. Moyle, Maureen Dollard, Saswata Narayan Biswas. "Personal and Economic Empowerment in Rural Indian Women: A Self-help Group Approach." *International Journal of Rural Management*, 2006: 125-127.
- UN Women. "Facts and Figures: Economic Empowerment." 2018.
- Vrushali Patil, Bandana Purkayastha. "The transnational assemblage of Indian rape culture." *Ethnic and Racial Studies* Voume 41, no. Issue 11 (2018).
- Walker, Anna S. *Theoretical Perspectives on Gender and Development*. International Development Research Centre, 2000.
- WIEGO. (2015-2021). *WIEGO ANNUAL REPORT*. WIEGO.
- WIEGO. C177: The Homework Convention – It's Time for Action! WIEGO , 2016.
- . "Our Voices Will be Heard." *The Regional Workshop On Women Workers In Informal Work--Organizing, Lobbying and Advocacy*. Bangkok: WIEGO, 2001. 5-17.
- . wiego.org. n.d. <https://www.wiego.org/C177> (accessed March 2022).
- Williams, Colin C. *The Informal Economy and Poverty: Evidence and Policy Review*. Joseph Rowntree Foundation, 2014.